**PERAN KEPALA DESA DALAM PELAKSANAAN DANA DESA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN
DANA DESA DI KABUPATEN PELALAWAN**

Oleh: Zulheri

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara

Pembimbing I: Dr. Dessy Artina, SH., MH

Pembimbing II: Widia Edoorita, SH., MH

Alamat: Jl. Purnama II . Pandau Jaya

Email / Telepon : zulheri2007@gmail.com / 0813-6508-3102

ABSTRACT

Indonesia is a region with a decentralized government system, national development. In a village, there are several apparatuses that carry out all activities related to the village, and one of the village officials who has an important function in the continuity of activities in the village scope is the village head. In carrying out his duties, the village head only coordinates with the local camat and is only responsible for running the village government, implementing village development, fostering village community and empowering village communities. The village head has duties and functions for the welfare of the local community, including establishing policies regarding the implementation of, establishing policies for managing village property, taking actions that result in expenditure on the burden, establishing PPKD, approving DPA, DPPA and DPAL, approving RAK village and approving SPP. As for the purposes of writing this thesis, namely: First, to determine the function of the village head in implementing village funds in Pelalawan Regency, Second, to find out what efforts the village head can make to anticipate the misuse of village funds in Pelalawan Regency.

This type of research is sociological law research, sociological, namely research on the effectiveness of the current law. Sources of data used in this study are primary data, secondary data and tertiary data.

From the results of this study it can be concluded that the function of the village head in implementing village funds based on the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 20 of 2018 concerning Village Fund Management in Pelalawan Regency can be said to be quite good in its implementation. Then related to the efforts that can be made by the village head to prevent misuse of village funds, including implementing the principles of transparency, accountability and participation in order to create better management of village funds.

Keywords: Village Head - Duties and Functions - Village

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan wilayah dengan sistem pemerintahan desentralisasi, pembangunan nasional ditunjukkan pada usaha peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan, menumbuhkan partisipasi aktif setiap anggota masyarakat pedesaan, dan menciptakan hubungan selaras antara masyarakat dengan lingkungannya.¹ Selain itu, pembangunan masyarakat pedesaan merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu mereka yang mengidentifikasikan kebutuhan dan masalahnya secara bersama-sama.²

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis Desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat Desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling konkret.³

Secara yuridis, Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan

masyarakat.⁴ Desa memiliki lingkungan masyarakat yang bisa dibidang masih tertinggal dari kota-kota dan desa masih banyak memakai sistem adat isitiadat dan didalam lingkungan Desa dengan kurangnya pemahaman tentang pengelolaan Dana Desa, pembangunan Desa yang mengakibatkan sering terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh instansi Desa sedangkan kepala Desa atau perangkat Desa melakukan pelaksanaan Dana Desa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 asas transparan, asas akuntabel dan asas partisipatif.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka ada beberapa rumusan masalah dalam proposal penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah peran Kepala Desa dalam pelaksanaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pelalawan?
2. Apa saja upaya yang perlu dilakukan Kepala Desa untuk mengantisipasi penyalahgunaan pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pelalawan
2. Untuk mengetahui apa saja upaya yang dapat dilakukan Kepala Desa untuk mengantisipasi penyalahgunaan pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pelalawan

¹ Tabrani rusyan, *manajemen pengembangan desa produktif* , Bumi aksara, Jakarta, 2018, Hlm. 1.

² *Ibid.*

³ Haw widjaja, *otonom desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*, Rajawali pers, Jakarta, 2012, Hlm. 4.

⁴ *Ibid*, Hlm.3.

⁵ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

2. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penelitian ini sangat diharapkan akan dapat bermanfaat dan bernilai guna antara lain:

a. Bagi Penulis

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- 2) Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan dan wawasan bagi penulis terkait peran Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

b. Bagi Dunia Akademik

Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya pada dunia akademisi dan dunia hukum, dan juga dapat menjadi bahan referensi kepustakaan bagi pembaca yang ingin melakukan pengembangan penelitian lebih lanjut dalam pokok permasalahan yang sama.

c. Bagi Instansi

Yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pedoman serta bahan informasi sekaligus masukan kepada pemerintah mengenai Dana Desa.

D. Kerangka Teori

Hukum merupakan landasan dari teori atas dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisa teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

1. Teori Kewenangan

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan JG Steenbeek menyatakan, "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*"⁶. Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata negara dan hukum administrasi.

2. Teori Pengawasan

Pengawasan berasal dari kata "awas" yang berarti antara lain "penjagaan". Isitilah pengawasan berasal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi, yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. George R. Terry menggunakan istilah "*control*" sebagaimana dikutip oleh Muchan: "*control is to determine what is accomplished, evaluate it, and apply corrective measures, if needed to unsure result in keeping with the plan*" yang berarti bahwa pengawasan menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi, dan menerapkan tindakan kolektif, jika perlu memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.⁷

E. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual berisikan batasan pengertian atau defenisi istilah-istilah yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian.

⁶ Nur basuki winarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, yogyakarta, 2008. Hlm. 65.

⁷ Muchson, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta:2000, hlm. 119.

1. Kepala desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai tugas, fungsi dan tanggung jawab sosial untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.⁸
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹
3. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.¹⁰
4. Desa adalah merupakan suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang didalamnya terdapat kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintah terendah langsung dibawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri¹¹.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis (penelitian hukum empiris) yaitu studi-studi empiris

⁸ Cst Kansil. Dan Christine ST Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, Hlm 21.

⁹ *Ibid*, hlm. 23.

¹⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Saku Dana Desa “*Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*”, hlm. 12.

¹¹ Pasal 2 Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.

untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat¹².

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikantor desa-desa pada Kabupaten Pelalawan khususnya di Kecamatan Bandar Petalangan. Hal ini dilakukan karena permasalahan yang banyak terjadi dan sesuai pada permasalahan atau topik pembahasan oleh peneliti.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama¹³. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak camat, kantor desa di Kabupaten Pelalawan di Kecamatan Bandar Petalangan.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi, akan tetapi dilaksanakan pada sampel.“ Penetapan sampel tersebut digunakan untuk memudahkan penelitian dalam mengungkap dan menemukan data dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

¹² Amirudin Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2004, hlm. 56.

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 15.

- b. Wawancara, adalah teknik mendapatkan keterangan secara lisan guna tujuan tertentu. Metode ini dipakai untuk mengecek dan memperdalam pengertian yang telah didapat dari data primer dan data sekunder.
- c. Kajian Kepustakaan, yaitu penulis mengambil kutipan dari buku bacaan, literatur, atau buku pendukung yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- d. Kuisioner, merupakan daftar pertanyaan dalam penelitian yang diharuskan untuk dijawab oleh responden atau informan.

5. Analisis Data

Dari data yang diperoleh baik dari observasi, hasil wawancara maupun studi kepustakaan akan diolah atau dianalisis dengan *metode kualitatif*, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga dapat memberikan penjelasan atas rumusan permasalahan yang penulis teliti. Dalam penelitian sosiologis, pengolahan data hakikatnya kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan tertulis.¹⁴

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kepala Desa

1. Pengertian Kepala Desa

Kepala desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah pejabat

pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.¹⁵ Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak.

Kepala Desa tidak bertanggung jawab kepada camat, namun hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Kepala Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Jabatan Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya wali nagari (Sumatera Barat), pambakal (Kalimantan Selatan), hukum tua (Sulawesi Utara), perbekel (Bali), kuwu (Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang dan Indramayu).¹⁶

2. Tugas dan kewenangan Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Pasal 101 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa

Dalam hal mengakomodir segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa selaku penguasa tunggal diwilayahnya dibantu oleh para perangkat Desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga Desa. Disamping itu pula,

¹⁴ Darmani Rosa, "Penerapan Sistem Presidensia dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.

¹⁵ Haw Widjaja, *Op. Cit*, hlm . 87.

¹⁶ Sebagaimana dikutip dari <https://infodesa.co.id/pengertian-tugas-hak-dan-wewenang-kepala-desa-yang-perlu-diketahui/> pada hari rabu 22 Juli 2020 pukul 09.07 wib.

perangkat Desa juga turut menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah. Meskipun demikian didalam melaksanakan tugasnya mempunyai batas-batas tertentu sehingga tidak dapat mengikuti kemauannya sendiri.¹⁷

- b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.

Dalam menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat Desa, Kepala Desa harus mampu mendamaikan perselisihan yang terjadi dimasyarakat. Dalam upaya mendamaikan perselisihan masyarakat Desa, Kepala Desa dibantu oleh lembaga adat Desa dan segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Desa bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.¹⁸

B. Tinjauan Umum Tentang Pengelolaan Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Undang-undang Desa telah menempatkan Desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp20,7 triliun, dengan rata-rata setiap Desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa

meningkat menjadi Rp46,98 triliun dengan rata-rata setiap Desa sebesar Rp 628 juta dan ditahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta.¹⁹

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.²⁰ Selain itu, tujuan dari Dana Desa itu mulai dari meningkatkan pelayanan publik di Desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian Desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar Desa dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.²¹

2. Konsep pengelolaan Dana Desa

Kata pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan pengelolaan pada dasarnya adalah pengendalian dan pemanfaatan semua sumber daya yang menurut suatu perencanaan diperlukan untuk atau penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu.²² Irawan mendefenisikan, pengeloaan sama dengan manajemen yaitu penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif

¹⁷ Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan*, Cetakan Keempat, PT Rianeka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 81.

¹⁸ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Pasal 101 huruf e Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

¹⁹ Sebagaimana dikutip dari <https://www.kemenkeu.go.id/media/buku-saku-dana-desa>. pada hari rabu 22 juli 2020 pukul 09.19 wib

²⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Buku Saku Dana Desa “*Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat*”, hlm. 12.

²¹ *Ibid*, hlm. 29.

²² Arikunto, Suharsimi., 1993, *Manjemen Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.²³

3. Prinsip penggunaan Dana Desa

Dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa, perlu diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan Dana Desa. Diantaranya sebagai berikut.²⁴

a. Keadilan

Dalam prinsip penggunaan Dana Desa sangat dianjurkan mengutip prinsip keadilan. Apabila hal ini dilakukan maka akan menghindarkan kesenjangan dan kecemburuan sosial antar Desa yang diampu. Atau dengan kata lain mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membedakan. Selain itu, ketika menerapkan prinsip keadilan dengan baik sangat besar kemungkinan penggunaan Dana

4. Asas-asas pengelolaan Dana Desa

Menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa, “Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”.²⁵

C. Tinjauan Umum Tentang Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa

1. Pemantauan Dana Desa

Pemantauan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa pengalokasian Dana Desa dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan di Desa dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dengan demikian, maka kesenjangan pembangunan antara perdesaan dengan perkotaan dapat berkurang. Pemantauan dan pengawasan juga ditujukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini. Proses pemantauan melibatkan seluruh *stakeholder* pengelolaan Dana Desa baik ditingkat pusat maupun daerah.²⁶ Pemantauan dilakukan untuk menghindari keterlambatan penetapan peraturan kepala daerah, memastikan penyaluran Dana Desa tepat waktu dan tepat jumlah, menghindari penundaan penyaluran Dana Desa tahap berikutnya, dan untuk mengetahui besaran Dana Desa yang belum disalurkan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa tahun anggaran sebelumnya.²⁷

2. Pelaksana Pengawasan atas Dana Desa

Agar pengelolaan Dana Desa semakin akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu masyarakat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Camat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga telah melakukan pengawasan pengelolaan Dana Desa.

Untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan.

²³Swastha, Basu dan Irawan. 1997, *Manajemen Pemasaran Modern*, Liberty Cetakan Kelima, Yogyakarta, hlm. 5.

²⁴Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Op.Cit.* hlm. 27.

²⁵Lihat pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

²⁶ Kementerian Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*, Jakarta, 2017, hlm. 89.

²⁷ Kemenkopmk, *Pemantauan dan Pengawasan Dana Desa*.

Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan Dana Desa.²⁸ Pemerintah pusat melakukan sinergi antar kementerian maupun dengan daerah secara berjenjang dengan melibatkan masyarakat dan aparat pengawas. Jadi, sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya Dana Desa ini diawasi oleh berbagai pihak, dari masyarakat Desa, camat, Badan Permusyawaratan Desa, Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Badan Pemeriksa Keuangan, serta Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu juga diawasi oleh Kementerian Keuangan dengan bersinergi dengan Kemendagri dan Kemendes PDTT.²⁹

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan

1. Sejarah Kabupaten Pelalawan

Wilayah Kabupaten Pelalawan, berawal dari kerajaan Pekantua yang didirikan oleh Maharaja Indera (sekitar tahun 1380 M) yang datang dari kerajaan Temasik (Singapura).³⁰ Beliau adalah orang besar di kerajaan Temasik yang di kalahkan oleh Majapahit abad XIV M. Lokasi kerajaan ini ialah dihulu sungai Pekantua. lebih kurang 20 km di hulu Muaratalum-Kampar (anak sungai Kampar, sekarang termasuk Desa Tolam, kecamatan Pelalawan.

²⁸ Kementerian Keuangan, *Buku Pintar Dana Desa (Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat)*, Jakarta, 2017, hlm. 90.

²⁹ Pemantauan dan pengawasan dana desa, peneur.trubus.id, hlm. 9.

³⁰ Sejarah Daerah Riau, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Dacrah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1997, him. 42.

kabupaten Pelalawan), pada tempat yang bernama "Pematang Tuo".

Pada masa selanjutnya, Kerajaan Pekantua dikuasai oleh Kerajaan Malaka setelah kerajaan ini mampu mengalahkan Kerajaan Pekantua. Raja Malaka bernama Sultan Mansyur Syah pun menjadi raja dari Kerajaan Pekantua. Nama Kerajaan Pakantua diubah menjadi Kerajaan Pekantua Kampar". Setelah Sultan Mansyur Syah wafat. ia digantikan oleh Sultan Mahmud Syah Pada masa inilah Kerajaan Malaka kemudian diserang dan dikalahkan oleh Portugis yakni pada tahun 1511 M.³¹

2. Kondisi Geografis Kabupaten Pelalawan

Luas Kabupaten Pelalawan 13.924,94 Km atau 14,73% dari total luas provinsi Riau. Ibukota Kabupaten terletak yang sebagian besar wilayah terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti (30,45%) dan terkecil Kecamatan Pangkalan Kerinci (1,39%).³² Kabupaten Pelalawan memiliki 12 kecamatan dengan 14 kelurahan dan dan 104 desa. Sementara jumlah Rukun Tetangga (RT) sebanyak 1840 dan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 645.³³

B. Gambaran Umum Terkait Lokasi Penelitian

1. Tinjauan Umum Desa Lubuk Raja (Bandar Petalangan)

Lubuk raja merupakan sebuah Desa yang berada di kecamatan Bandar Petalangan yang berdiri pada tahun 2008 yang langsung

³¹ *Ibid.*

³² sebagaimana dikutip dari <http://pelalawankab.bps.go.id/frontend/index.php/Publikasi> diakses pada tanggal 02 Februari 2020Pukul 20.30 WIB.

³³ Tennes Effendy dkk, *Op. Cit*, hlm. 51.

diresmikan oleh Bupati Pelalawan Tengku Azmun Jafaar yang semasa itu beliau menjabat sebagai Bupati Pelalawan. Desa Lubuk Raja di pimpin oleh Kepala Desa Eri Suparjan yang merupakan Kepala Desa termuda yang ada di kecamatan Bandar Petalangan Eri Suparjan telah dua periode menjabat sebagai Kepala Desa di desa Lubuk Raja tersebut. Dimana, Desa tersebut memiliki jumlah penduduk sebanyak 917 orang dengan berbagai suku yang ada didalam Desa Lubuk Raja tersebut. Diantaranya terdapat suku melayu, batak dan jawa.

2. Tinjauan Umum Desa Air Terjun (Bandar Petalangan)

Air Terjun merupakan sebuah Desa yang berada di kecamatan Bandar Petalangan dipimpin oleh seorang Kepala Desa Saparudin, desa Air Terjun ini Pemekaran dari desa Terbangiang, yang mana Desa ini baru berdiri pada tahun 2010. Asal-usul Desa ini melakukan pemekaran adalah untuk mencari kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Desa tersebut. Sudah dua periode pemimpin kepala desa Air Terjun periode pertama dipimpin oleh Amirudin Syam dan Periode kedua dipimpin oleh Saparudin. Beliau merupakan Kepala Desa baru yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan umum. Rasio jumlah penduduk yang ada di desa Air Terjun yakni berjumlah 1080 orang.

3. Tinjauan Umum Desa Sorek Dua (Pangkalan Kuras)

Sorek Dua merupakan sebuah Desa yang berada di kecamatan Pangkalan Kuras dengan dipimpin oleh seorang kepala desa M. Yanis. Dimana Desa tersebut memiliki penduduk berjumlah 2.662 orang. Desa Sorek Dua merupakan Desa yang terletak dipinggir jalan lintas timur yang berdekatan dengan

Kelurahan Sorek Satu. Pada permulaan berdirinya Desa Sorek Dua, masih dikelilingi hutan yang umumnya sejenis tanaman bambu dan sawit. Masyarakat yang bermukim dipinggiran sungai Kuala Napuh dan secara berangsur-angsur membuka permukiman di Desa tersebut.

4. Tinjauan Umum Desa Simpang Beringin (Bandar Sekijang)

Desa Simpang Beringin merupakan Desa yang berada di kecamatan Bandar Sekijang, yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa Taharuddin. Desa ini berada ditengah jalan lintas timur dan memiliki penduduk sebanyak 3.822 orang. Hal lainnya adalah, bahwa Desa Simpang Beringin juga berbatasan langsung dengan kota Pekanbaru.

Masyarakat Desa Simpang Beringin mayoritas masyarakatnya bersuku Melayu. Disamping itu juga ada suku lainnya seperti suku jawa, batak dan nias yang merupakan suku pendatang di Desa tersebut. Mayoritas masyarakat Desa Simpang Beringin bermata pencaharian sebagai petani karet, sawit dan wirausaha.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pelalawan

Kepala Desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Kemudian Kepala Desa memiliki tugas dan fungsi atas kesejahteraan

masyarakat setempat dalam naungan Desa tersebut. Selain itu, penulis akan mencoba untuk menilik pemaknaan yang termaktub didalam Undang-Undang yang berlaku dengan menjabarkan beberapa poin, diantaranya.

1. Menciptakan Kesejahteraan Bagi Masyarakat dari Pelaksanaan APBDesa

Menurut Hasan (2015:3), menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah perturan Desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran Desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa, dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.³⁴ Kepala Desa sebagai pempin suatu Desa sudah seharusnya memiliki peran penting dalam menetapkan segala kebijakan terutama tentang pelaksanaan APBDesa. Selaras dengan aturan yang telah dituangkan dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018.

2. Meningkatkan Pembangunan Desa

Desa patut dilindungi dan di jaga keasliannya yang mana adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimana dalam berlangsungnya perkembangan Desa tidak terlepas dari peran masyarakat serta kepemimpinan kepala Desa dan perangkat Desa yang ada pada Desa. Yang mana semua peran dari aparat pemerintah Desa maupun masyarakat amat penting dalam proses pembangunan Desa.³⁵

³⁴ Johnetha Lafani Supit, implemenntasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa lowian kecamatan maesaan kabupaten minahasa selatan, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 2017, hlm. 891-904.

³⁵ Didik.G.Suharto, 2016, membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU

3. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat, secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses yang membangun manusia atau masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat.³⁶

Pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya suatu kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah mengakibatkan mereka tidak mampu dan tidak tahu. Ketidakmampuan dan ketidaktahuan masyarakat mengakibatkan produktivitas mereka rendah. Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui: Pengembangan masyarakat, Pengorganisasian masyarakat. Apa yang dikembangkan dari masyarakat, yaitu potensi atau kemampuannya, dan sikap hidupnya. Kemampuan masyarakat meliputi antara lain kemampuan untuk bertani, berternak, melakukan wirausaha, atau keterampilan membuat home industri; dan masih banyak lagi kemampuan dan keterampilan masyarakat yang dapat dikembangkan.³⁷

B. Upaya yang perlu dilakukan Kepala Desa untuk mengantisipasi penyalahgunaan pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pelalawan

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu juga harus mempertimbangkan segala upaya yang perlu dilakukan, terlebih hal itu saling

No.5/1979,UU No.22/1999, & UU No.32/2004 serta Perspektif UU No.6/2014), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 22.

³⁶ Dikutip <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/298165/pemberdayaan-masyarakat-desa-berkemajuan>

Pada 1 November 2020.

³⁷ *Ibid.*

berkaitan dengan pelaksanaan Dana Desa. Dana Desa tersebut merupakan tanggung jawab mutlak seorang Kepala Desa dalam pengelolaannya. Tentu hal ini membutuhkan perencanaan yang matang sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa khususnya di Kabupaten Pelalawan.

Di dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 di jelaskan bahwa di dalam Pasal tersebut pengelolaan keuangan Desa meliputi pelaksanaan. Sedangkan di dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan tentang Pelaksanaan Dana Desa sebagai berikut:³⁸

- a. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.
- b. Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur keuangan.
- c. Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, rekening kas Desa dibuka diwilayah terdekat yang dibuat oleh pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan Kepala Desa dan Kaur keuangan.

1. Mejalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Desa untuk lebih transparan

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara rill langsung menyentuh keutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Sebagai wakil negara, Desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan

³⁸ dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Dana Desa.

kehidupan untuk sebenar-benarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Salah satu prinsip penting dalam tata pemerintahan yang baik adalah transparansi dalam hal keuangan. Untuk memegang dan melaksanakan prinsip ini, maka harus selalu diterapkan dalam mengatasi setiap masalah keuangan Desa. Salah satu contoh penerapan misalnya bukti transaksi.³⁹

2. Pentingnya pengelolaan Dana Desa dengan cara yang akuntabel Kementerian Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus berupaya membangun sarana dan prasarana untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam tiga tahun terakhir tak hanya infrastruktur, pembangunan sarana ini juga melingkupi empat program prioritas seperti pendirian Badan Usaha Milik Desa, pembangunan embung dan sarana olah raga. Selama tiga tahun pengucuran Dana Desa, angka kemiskinan dan pengangguran di Desa ternyata tidak berkurang signifikan. Disisi lain, laporan dugaan pelanggaran pengelolaan Desa terus meningkat. Besarnya Dana Desa yang telah dikucurkan pemerintah dari tahun 2015 sebesar Rp. 20.776 Triliun melalui APBN-P 2015 untuk 74.093 desa dan tahun 2016 sebesar Rp. 46,982 Triliun melalui APBN 2016 untuk 74.754 ternyata tidak mampu mendongkrak kemakmuran Desa.⁴⁰

3. Meningkatkan partisipatif Kepala Desa pada pelaksanaan Dana Desa

³⁹ Sebagaimana dikutip dari <https://sukabumiupdate.com/detail/bale-warga/opini/63805-Pentingnya-Transparansi-Manajemen-Keuangan-Desa-Untuk-Mengoptimalkan-Kesejahteraan-Masyarakat>, pada hari rabu tanggal 1 Juli 2020, Pukul 11.36 WIB.

⁴⁰ Nurlinda, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol.6 | No.1 | 2018

Pembangunan Desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan bagian terpenting yang menentukan keberhasilan dari pembangunan nasional. Suksesnya pembangunan Desa akan berimbas pada keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Seluruh proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Pelalawan dapat dikatakan cukup baik dalam pengimplementasiannya. Kelebihan dan kekurangan merupakan suatu dinamika dalam menjalankan peran yang diemban oleh seorang Kepala Desa. Lebih lanjut lagi, peran dari Kepala Desa terbagi menjadi tiga. *Pertama*, dengan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dari pelaksanaan APBDesa. Hal ini merupakan peran yang cukup penting dari kepala Desa mengingat tolak ukur berhasil atau tidaknya seorang Kepala Desa adalah dengan memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Didalam penelitian yang dilakukan Kepala Desa sudah menjalankan perannya dengan baik. yang mana segala upaya dilakukan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Pelalawan. *Kedua*, meningkatkan pembangunan Desa. Dalam hal ini juga sudah

menggambarkan bahwa Kepala Desa berhasil menjalankan perannya dengan baik. Dimana meningkatkan pembangunan Desa juga merupakan hal yang cukup penting.

2. Terkait Upaya apa saja yang perlu dilakukan Kepala Desa untuk mengantisipasi penyalahgunaan pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pelalawan, penulis mengambil kesimpulan bahwa terdapat tiga poin yang harus dilakukan oleh Kepala Desa. *Pertama*, menjalankan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Dana Desa untuk lebih transparan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar konsep keterbukaan dapat berjalan secara baik. sebab, dengan keterbukaan dan transparansi dalam pelaksanaan Dana Desa akan memperkecil celah terjadinya penyalahgunaan pelaksanaan dari Dana Desa tersebut. *Kedua*, pentingnya pengelolaan Dana Desa dengan cara yang akuntabel. Sudah jelas dengan pelaksanaan yang akuntabel akan memperkecil celah terjadinya penyalahgunaan Dana Desa.

B. Saran

1. Terkait peran Kepala Desa dalam pengelolaan Dana Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Pelalawan dapat dikatakan masih terdapat beberapa kekurangan terutama pada teknis dilapangan. Oleh karenanya penulis memiliki saran yang bertujuan untuk menyempurnakan hal yang dianggap kurang maksimal tersebut, diantaranya dengan meningkatkan kesadaran bersama terutama bagi anggota pemerintah Desa untuk lebih meningkatkan sinergitas antar satu dan lainnya. Kemudian, pemerataan pembangunan juga harus dilakukan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi

kecemburuan sosial antar masyarakat satu dan lainnya. Kemudian dengan ditambahkannya anggaran pada sektor pemberdayaan masyarakat yang bertujuan agar lebih maksimalnya pelatihan yang diberikan guna menunjang taraf kehidupan bagi masyarakat sekitar.

2. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa sudah seharusnya dengan menciptakan komunikasi yang baik antar Kepala Desa, anggota pemerintahan Desa dan masyarakat setempat. Hal ini apabila dilakukan dengan maksimal maka sangat kecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan Dana Desa oleh Kepala Desa tersebut. Selain itu, dengan konsep kepercayaan yang telah diberikan kepada pemimpin di Desanya, alangkah baiknya Kepala Desa dapat meningkatkan profesionalisme dan proporsionalismenya dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin tertinggi khususnya pada Desa-desa di Kabupaten Pelalawan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adman, Nursal. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Arikunto, Suharsimi, 1993, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amirudin, Zainal Askin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang, Sunggono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan, Ashsofah, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bayu, Surianingrat, 1992, *Pemerintahan Administrasi Desa Dan Kelurahan, Cetakan Keempat*, Jakarta, PT Rianeka Cipta.
- Chabib, Soleh dan Heru Rochmansjah, 2015, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Fokus media.
- Chandra, kusuma Putra, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Dana Desa*, Universitas Brawijaya.
- Didik.G.Suharto, 2016, *membangun Kemandirian Desa (Perbandingan UU No.5/1979,UU No.22/1999, & UU No.32/2004 serta Perspektif UU No.6/2014)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Djohermansyah, Djohan, 2006, *Etika Pemerintah*, Universitas Terbuka, Banten.
- Eny, kusdarini, 2011, *Dasar-Dasar Hukum administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik*, UNY Press, Yogyakarta.
- Faisal, Akbar Nasution, 2009, *Pemerintah Daerah Dan Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah*. PT. Sofmemedia, Jakarta.
- Hanif, Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga.
- Haw, widjaja, 2012, *otonom desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*, Rajawali pers, Jakarta.

- Hasyin, Adnan, *Pengawasan Alokasi Dana Desa dalam Pemerintahan Desa*, Fakultas Hukum Islam Bandung.
- Jefta, Leibo, 1995, *Sosiologi Pedesaan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Joeniarto, 1992, *Perkembangan Pemerintah Lokal*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Joko, Purnomo, 2016, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Infest, Yogyakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Saku Dana Desa "Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat"*.
- Lapananda, 2016. *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, Buku I. Penerbit Rmbooks. Jakarta.
- Marwan, 2009, *Kamus Hukum "Dictionary Of Law Complete Edition"*, Reality Publisher, Surabaya.
- Muchson, 200, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Nawawi, H. Hadari, 1993, *Pengawasan Melekat Dilingkungan Aparatur Pemerintah*. Erlangga, Jakarta.
- Nur, basuki winarno, 2008, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi*. Laksbang Mediatama, yogyakarta.
- Darmani Rosa, "Penerapan Sistem Presidensia dan Implikasinya Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara Di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Menara Yuridis, Edisi III, 2009, hlm. 71.
- Johnetha Lafani Supit, implemenmtasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa di desa lowian kecamatan maesaan kabupaten minahasa selatan, *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 2017, 891-904
- Manufactures 'Finence Co, "equality", *Jurnal West Law*" Supreme Court Of the United States, 1935, diakses melalui <http://fh.unri.ac.id/index.php/perpustakaan/#>, pada tanggal 20 Januari 2020 dan diterjemahkan oleh google translate
- Nurlinda, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* Vol.6 | No.1 | 2018
- Resti wisna pobelai, analisis pengelolaan aset desa di kota kotamobagu, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi*, hlm. 204
- Tiffani Ardillah, upaya kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No. 1. hlm. 73
- Ulfia Hasannah, "Implementasi Politik Hukum dalam Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum", *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau*,

No.1 Vol 2, 1 Februari 2011, hlm. 211.

United States Court Of International Trade. THE COALITION FOR THE PRESERVATION OF AMERICAN BRAKE DRUM AND ROTORAFTERMARKET MANUFACTURERS, Plaintiffv, UNITED STATED, Defendant. SLIP OP. 04-31.Court No. 01-00825.April 1,2004. *Jurnal West Law*. Diakses melalui <http://lib.unri.ac.iid/e-journal-e-book/>, pada 18 november 2019

Widia Edorita, “Menciptakan sebuah sistem hukum yang efektif, dimana harus dimulai?”, *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Riau, No. 1 Agustus 2010*.

Yuliasatika, *Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah*”, *Jurnal Ilmu Hukum Pasacasarjana Universitas Tadulako, No. 4 Vol. 5, April 2017, Hlm. 161*.

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Peraturan Desa..

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Permendagri Nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa.

PMK No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Surat Mendagri No. 700/1281/A.1/IJ, 22 Desember 2016.

D. Website

dikutip https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pelalawan pada hari selasa tanggal 12 februari 2018 pukul 15.55 wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepala_desa pada hari selasa 12 februari 2019, pukul 15.33 wib.

<https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa>. pada hari rabu 22 juli 2020 pukul 09.19 wib

Inilah Dasar Hukum dan Mekanisme Pengawasan Dana Desa, www.danadesa.id, diakses pada tanggal : 18 Desember 2018.

Bagaimana Mekanisme Pengawasan Penggunaan Dana Desa di tingkat desa, bpkad.banjarkab.go.id, diakses pada tanggal : 18 Desember 2018.

Peran Aktif Camat Hindari Masalah Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, www.suarantb.com, diakses pada tanggal : 18 Desember 2018.